



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

LAPORAN KINERJA LKJ TAHUN 2023



Jl. A.Yani No.1 Telp-Fax. (0741) 66269
e-Mail : diskominfo@Jambiprov.go.id,
Website [http : // diskominfo.Jambiprov.go.id](http://diskominfo.Jambiprov.go.id)



Kata Pengantar

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Jambi Tahun 2023 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023. LKjIP Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi Tahun 2023 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Laporan ini sebagai media informasi publik atas capaian kinerja yang terukur. Capaian kinerja disajikan melalui pengukuran dan evaluasi kinerja serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai atas hasil analisis pengukuran kinerja.

Tujuan Penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Tahun 2023 ini disusun. Semoga dapat bermanfaat bagi Pemerintah Provinsi Jambi dan masyarakat secara keseluruhan.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Jambi, 19 Januari 2024

KEPALA DINAS,

Drs. ARIANSYAH, ME

Pembina Utama Madya

NIP. 19720603 199302 1 001

Ikhtisar Eksekutif

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjiP) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi Tahun 2023 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi yang memuat rencana, capaian, dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis. Sasaran dan indikator kinerja termuat dalam Renstra Dinas Kominfo Provinsi Jambi Tahun 2021-2026. Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan seperti telah dirumuskan dalam rencana strategis.

Ringkasan prestasi kinerja Dinas Kominfo Provinsi Jambi yang dihasilkan di tahun 2023, dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Sasaran Meningkatnya layanan informasi dan komunikasi publik, dengan indikatornya Peringkat keterbukaan Informasi publik dan Indikator Jumlah Kerjasama Media memperoleh angka 112,1%;
2. Sasaran Meningkatnya infrastruktur TIK, termasuk fasilitasi pengadaan akses internet di desa untuk mewujudkan Jambi bebas blank spot dengan indikatornya jumlah desa yang difasilitasi akses internet sebesar 98,34%;
3. Sasaran Meningkatnya Penggunaan teknologi informatika dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan indikatornya Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) memperoleh angka sebesar 118,21%;
4. Sasaran Meningkatnya layanan persandian dengan indicator Indeks Keamanan Informasi memperoleh angka sebesar 100%
5. Sasaran Meningkatnya ketersediaan data Statistik Sektoral Pemerintah Provinsi Jambi dengan indikatornya Persentase Data Statistik Sektoral OPD terinventarisasi terupdate, valid dan terintegrasi memperoleh angka sebesar 89,7%;dan
6. Sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan Kantor dan akuntabilitas kinerja dengan indicator IKM dan Nilai SAKIP memperoleh angka sebesar 85,93%

Evaluasi atas pencapaian kinerja dan permasalahan yang ditemui pada setiap sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Dinas Kominfo Provinsi Jambi ke depan, sebagai berikut:

1. Perlunya peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah yang dapat mendorong pencapaian tujuan pembangunan daerah secara keseluruhan;
2. Perlunya peningkatan kualitas monitoring dan evaluasi pembangunan daerah melalui pendekatan yang bersifat kualitatif;dan
3. Menindaklanjuti rencana perbaikan setiap sasaran dan indicator Tahun 2023.

Hasil evaluasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini penting dipergunakan sebagai dasar bagi Dinas Kominfo Provinsi Jambi dalam perbaikan kinerja di tahun yangakandatang.

Daftar Isi

KATA PENGANTAR

IKHTISAR EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN.....	2
1.1 Struktur Organisasi.....	2
1.2 Fungsi dan Tugas	2
1.3 Isu-Isu Strategis	3
1.4 Keadaan Pegawai	4
1.5 Keuangan.....	5
1.6 Sistematika LKj IP.....	5
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	7
2.1 Perencanaan Strategis.....	7
2.1.1 Visi dan Misi Kepala Daerah.....	8
2.1.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	10
2.1.3 Strategi dan arah Kebijakan	12
2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2023	12
2.3 Rencana Anggaran Tahun 2023.....	13
2.3.1 Target Belanja Dinas/Badan/Biro..... Provinsi Jambi	13
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	15
3.1. Capaian Kinerja Tahun 2023.....	15
3.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis	16
3.2.1. Peringkat Keterbukaan Informasi Publik	17
3.2.2. Jumlah Kerjasama	19
3.3. Realisasi Anggaran	32
BAB IV PENUTUP.....	39
LAMPIRAN	

BAB 1

Pendahuluan

BAB I berisi :

- 1.1. Struktur Organisasi
- 1.2. Tugas dan Fungsi
- 1.3. Isu-Isu Strategis
- 1.4. Keadaan Pegawai
- 1.5. Keuangan
- 1.6. Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Penyusunan Laporan Dinas Kominfo Provinsi Jambi Tahun 2023 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Gubernur Jambi Nomor 729/KEP.GUB/SETDA.ORG-2.2/2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Pemerintah

Provinsi Jambi.

Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia. Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kominfo Provinsi Jambi Tahun 2023 diharapkan dapat :

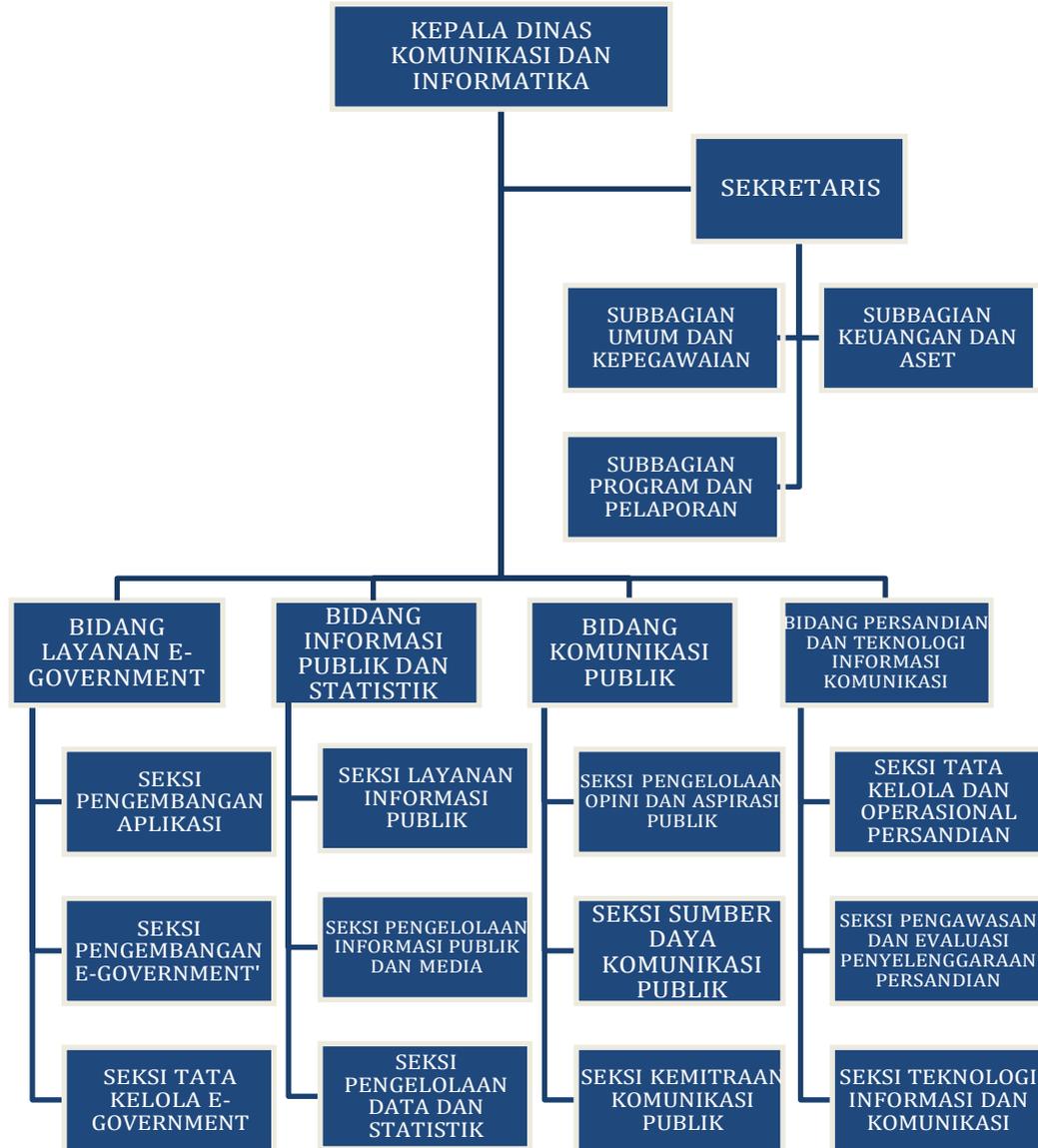
1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Dinas Kominfo Provinsi Jambi
2. Mendorong Dinas Kominfo Provinsi Jambi di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Kominfo Provinsi Jambi untuk meningkatkan kinerjanya.
4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Dinas Kominfo Provinsi Jambi di dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

1.1 Struktur Organisasi

Dinas Kominfo Provinsi Jambi dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi.

Dinas Kominfo Provinsi Jambi merupakan unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan susunan organisasi sebagai berikut:

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Kominfo Provinsi Jambi



1.2 Tugas dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 45 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi, sebagaimana telah dirubah menjadi Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2020 dan terakhir Peraturan Gubernur Jambi Nomor 5 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan

Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi, Dinas Kominfo mempunyai tugas membantu Gubernur dalam rangka pelaksanaan sebagian urusan pemerintahan daerah di Bidang Komunikasi dan Informatika berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Komunikasi, Informatika Provinsi Jambi mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan di bidang Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang Komunikasi, informatika,
- e. Persandian dan Statistik; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur.

Dinas Kominfo Provinsi Jambi senantiasa berusaha menjalankan Tugas dan Fungsi tersebut dengan baik, namun demikian banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan Dinas Kominfo Provinsi Jambi dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

1.3 Isu-isu Strategis

Eksistensi sebuah institusi bergantung sejauh mana institusi tersebut mampu menemukan dan merespon isu strategis dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat. Secara umum isu strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Isu Strategis yang melingkupi Dinas Kominfo Provinsi Jambi , antara lain sebagai berikut:

1. Perlu adanya komitmen Bersama Perangkat daerah terkait keterbukaan Informasi publik pemerintah daerah mengingat sumber Informasi berasal dari Perangkat daerah dan menjamin ketersediaan layanan Informasi publik yang berkualitas dan diakses secara mudah dan cepat.
2. Pembentukan dan pemberdayaan masyarakat informatif melalui penyebaran, penyediaan dan pemanfaatan informasi, yang dilaksanakan oleh pemerintah secara aktif, dengan mengumpulkan informasi yang bermanfaat untuk dapat diakses oleh masyarakat secara mudah;
3. Jumlah kerjasama dengan media melebihi target namun perlu memperhatikan kriteria yang harus dipenuhi oleh media.
4. Penguatan infrastruktur jaringan internet dan intranet lingkup Pemerintah Provinsi Jambi pada semua Perangkat Daerah serta jaringan intranet kepada pemerintah kabupaten/kota yang juga merupakan indikator nasional;

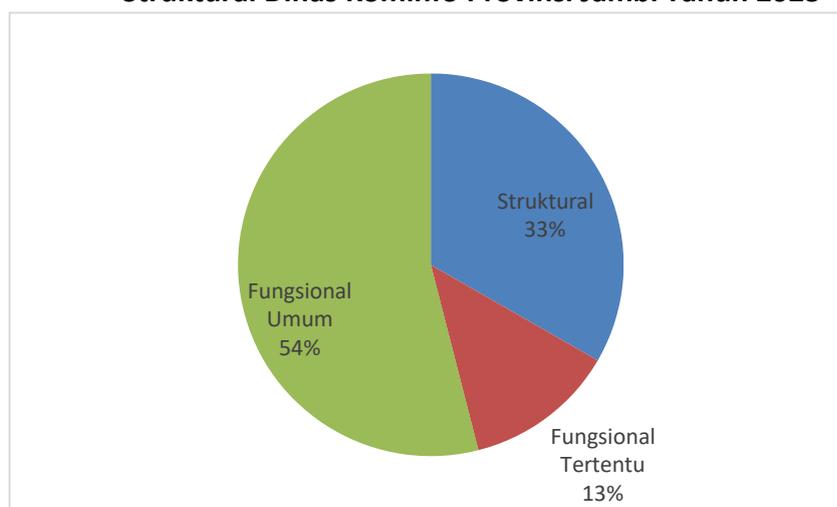
5. Peningkatan komitmen dan implementasi e-Government Pemerintah Provinsi Jambi dengan memperhatikan percepatan penerapan system penghubung layanan pemerintah daerah, optimalisasi layanan pemerintah berbasis elektronik, dan ;
6. Peningkatan dan pengembangan sumber daya aparatur di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Jambi yang menguasai teknologi informasi secara berkala dan berkelanjutan.

1.4 Keadaan Pegawai

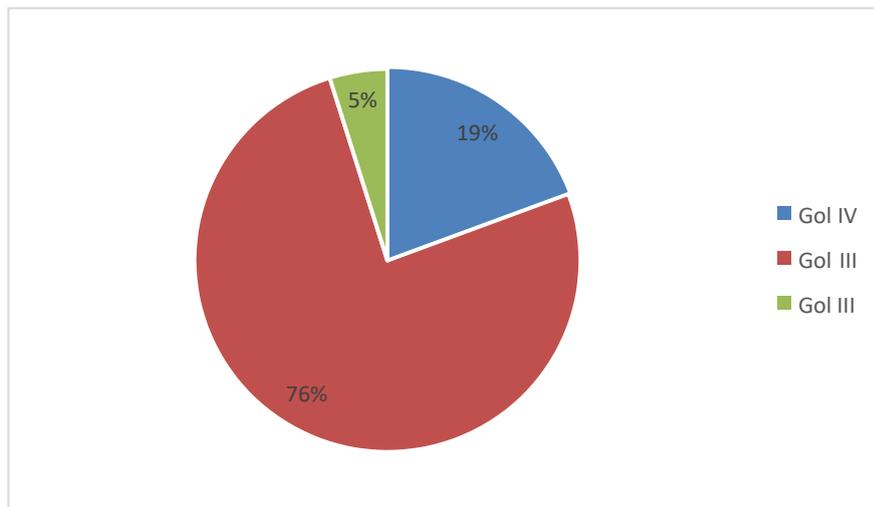
Untuk mendukung pelaksanaan tugas Dinas Kominfo Provinsi Jambi yaitu melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Kominfo, Statistik dan Persandian sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2020 dan terakhir Peraturan Gubernur Jambi Nomor 5 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Kominfo Provinsi Jambi diperlukan SDM yang kompeten dan berkualitas. Kondisi SDM di Dinas Kominfo Provinsi Jambi sampai dengan 31 Desember 2023, tercatat sebanyak 63 pegawai yang terdiri 21 pejabat struktural, 8 pejabat fungsional tertentu, dan 34 pejabat fungsional umum. Profil Kepegawaian Dinas Kominfo Provinsi Jambi disajikan dalam tabel berikut :

Gambar 1.2. Grafik Profil Kepegawaian berdasar Jabatan Pejabat Struktural Dinas Kominfo Provinsi Jambi Tahun 2023



Gambar 1.3. Grafik Profil Kepegawaian Berdasarkan Golongan Dinas Kominfo Provinsi Jambi Tahun 2023



Berdasarkan grafik di atas dapat terlihat bahwa masih terdapat kesenjangan pemenuhan kebutuhan pegawai di Dinas Kominfo Provinsi Jambi terutama untuk jabatan fungsional umum agar dapat memberikan kinerja secara maksimal serta pegawai di Dinas Kominfo sebagian besar merupakan pegawai Golongan III.

1.5 Keuangan

Dukungan dana atau anggaran yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Kominfo Provinsi Jambi pada tahun 2023 berasal dari APBD Daerah Provinsi Jambi. Pada Tahun Anggaran 2023 Dinas Kominfo Provinsi Jambi mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.40.067.858.836,- dengan rincian belanja tidak langsung sebesar Rp.10.908.329.608,- dan belanja langsung sebesar Rp.29.650.845.241,- yang diperuntukkan baik untuk mendukung pelaksanaan program yang berkaitan langsung dengan indikator sasaran strategis maupun program-program pendukung. Belanja langsung yang berasal dari seluruhnya berasal dari APBD yang didukung oleh 5 program dan 13 kegiatan.

1.6 Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi tahun 2023 adalah sebagai berikut

Ringkasan Eksekutif memuat:

1. Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam

rencana strategis serta sejauh mana instansi pemerintah mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya;

2. Disebutkan pula langkah-langkah apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada tahun mendatang.

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini memuat tentang alasan disusun LKjIP/manfaat LKjIP, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Kominfo Provinsi Jambi, Isu-Isu strategis, keadaan pegawai, Keuangan dan sistematika LLjIP.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Pada bagian ini disajikan gambaran singkat mengenai rencana strategis, dan dan perjanjian kinerja. Pada awal bab disajikan gambaran secara singkat sasaran utama yang ingin diraih instansi pada tahun yang bersangkutan serta bagaimana kaitannya dengan capaian visi dan misi Kepala Daerah.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi, dan analisis akuntabilitas kinerja. Termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis perbandingan data kinerja secara memadai, keberhasilan/kegagalan, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.

Disajikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan rencana dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tugas dan fungsi atau tugas-tugas lainnya dalam rangka mencapai sasaran organisasi yang telah ditetapkan, termasuk analisis tentang capaian indikator kinerja dan efisiensi.

Disajikan pula inovasi yang telah dilakukan oleh Perangkat daerah. Inovasi dimaknai sebagai penemuan hal-hal baru atau proses kreatif terhadap sesuatu yang sudah ada maupun yang sudah ada sebelumnya. Inovasi dianggap mampu meningkatkan nilai tambah output kegiatan yang berkualitas

BAB IV PENUTUP

Pada bagian ini dikemukakan simpulan secara umum tentang keberhasilan/kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja instansi yang bersangkutan serta strategi pemecahan masalah.

LAMPIRAN

BAB 2

Perencanaan & Perjanjian Kinerja

Bab 2 berisi :

1. Perencanaan Strategis
2. Perjanjian Kinerja Tahun 2023
3. Rencana Anggaran Tahun 2023

2.1 Perencanaan Strategis

Memasuki Tahun 2023, Dinas Kominfo Provinsi Jambi menyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kominfo Provinsi Jambi Tahun 2021-2026. Renstra Dinas Kominfo Provinsi Jambi merupakan manifestasi komitmen Dinas Kominfo Provinsi Jambi dalam mendukung visi dan misi Pemerintah Daerah Provinsi Jambi yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2021-2026.

Sebagai bentuk pembangunan berkelanjutan, perumusan Renstra Dinas Kominfo Provinsi Jambi Tahun 2021-2026. tidak terlepas dari kesuksesan pencapaian target yang telah ditetapkan daldam dokumen perencanaan periode sebelumnya (2016-2021).

RPJMD Pemerintah Daerah Provinsi Jambi merupakan dokumen landasan atau acuan pokok penyelenggaraan dan pelaksanaan pembangunan pemerintahan selama lima tahun, sesuai Peraturan Daerah Nomor 11 Tahunn2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021-2026.

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah periode lima tahun. Renstra memuat tujuan, sasaran dan strategi bagi penyelenggaraan program dan kegiatan di Dinas Kominfo Provinsi Jambi yang harus dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan. Sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, Renstra Dinas Kominfo Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021 – 2026.

2.1.1. Visi dan Misi Kepala Daerah

Visi Misi Gubernur Provinsi Jambi yang dituangkan dalam RPJMD Provinsi Jambi berupaya untuk menyinambungkan perencanaan periode 5 tahun sebelumnya (2016-2021) dengan perencanaan periode yang setelahnya (2021-2026). Visi Misi Gubernur Provinsi Jambi pada perencanaan periode 2021-2026 berkesinambungan dan melanjutkan keberhasilan capaian pembangunan dengan periode sebelumnya. Visi pembangunan daerah dituangkan dalam RPJMD yang disampaikan oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada waktu proses Pilihan Kepala Daerah adalah:

“Terwujudnya Jambi Maju, Aman, Nyaman, Tertib, Amanah dan Profesional dibawah Ridho Allah SWT”. Dalam rangka mewujudkan tema visi tersebut, Gubernur Provinsi Jambi menyampaikan misi, yakni :

1. Memantapkan Tatakelola Pemerintahan, yaitu menerapkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, dan melayani dengan didukung e-government yang terintegrasi.
2. Memantapkan Perekonomian Masyarakat dan Daerah, yaitu pengelolaan ekonomi yang maju, terkendali dan berkeadilan melalui pembinaan dan pengelolaan sumber daya alam dan komoditas unggulan yang berwawasan lingkungan, ketahanan bencana dan perubahan iklim, serta pembangunan infrastruktur pelayanan dasar, pengendalian pemanfaatan ruang berdasarkan kearifan lokal untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan pembangunan.
3. Memantapkan Kualitas Sumberdaya Manusia, yaitu meningkatkan kualitas sumberdaya manusia sehingga berdaya saing melalui perluasan akses pendidikan, kesehatan, olahraga, keagamaan, sosial budaya dan kesetaraan gender.

Selanjutnya visi misi tersebut dijabarkan dalam Tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah yang selengkapnya dituangkan dalam bagan alir *cascade* RPJMD Provinsi Jambi 2021-2026 sebagai berikut,

**Tabel 2.1 Ringkasan Visi Misi RPJMD Provinsi Jambi
2021-2026**

Visi: “Terwujudnya Jambi Maju, Aman, Nyaman, Tertib, Amanah dan Profesional dibawah Ridho Allah SWT”					
No.	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
1.	Memantapkan tata kelola	Terwujudnya tata kelola	Indeks Reformasi	Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	Predikat AKIP
					Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah

	pemerintahan	pemerintahan daerah yang bersih, transparan, dan akuntabel dengan pelayanan publik berkualitas	Birokrasi	Terwujudnya Birokrasi yang kapabel dengan pelayanan publik yang prima	Skor tingkat kematangan Perangkat daerah provinsi Jambi Indeks Kepuasan Masyarakat
2.	Memantapkan Perekonomian Masyarakat Dan Daerah	Memulihkan perekonomian daerah melalui pengelolaan komoditas unggulan yang berkelanjutan (ekonomi hijau) guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Pertumbuhan PDRB Hijau	Memantapkan pengelolaan komoditas unggulan non pertambangan	Kontribusi sector pertanian, kehutanan, dan perikanan terhadap PDRB
				Meningkatnya industry pengolahan	Kontribusi Industri pengolahan terhadap PDRB
				Meningkatkan peran sector pariwisata serta industry kecil dan menengah pendukung pariwisata	Kontribusi sector pariwisata terhadap PDRB
				Memantapkan kualitas pelayanan dasar dan infrastruktur dasar	Rasio Konektivitas
					Akses terhadap air minum layak
					Rasio elektrifikasi
					Persentase luas sawah beririgasi
				Meningkatnya kualitas lingkungan	Persentase Desa/Kelurahan yang memiliki akses internet
			Indeks Kualitas Lingkungan Hidup		
			Tingkat Kemiskinan	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca berbasis lahan (GRK) (juta ton CO2)	
Menurunnya tingkat pengangguran	Tingkat pengangguran terbuka				
Meningkatkan ketersediaan pangan dan kemudahan akses terhadap pangan	Indeks ketahanan pangan				
3.	Memantapkan kualitas sumber daya manusia	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang terdidik, sehat, berbudaya agamis dan kesetaraan gender	Indeks Pembangunan Manusia	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup
				Meningkatnya akses terhadap pendidikan	Rata-rata lama sekolah
				Meningkatnya kesadaran dan pengetahuan	Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan

				masyarakat dalam pengembangan seni dan budaya	upacara adat
				Meningkatnya toleransi intra dan antar agama	Indeks kebebasan dari diskriminasi
				Meningkatnya kapabilitas dan partisipasi perempuan di berbagai bidang kehidupan	Indeks pemberdayaan gender

Sumber : RPJMD Provinsi Jambi 2021-2026

Berangkat dari Tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah tersebut dan sesuai tugas dan pokok fungsinya, Dinas Kominfo Provinsi Jambi berupaya mendukung pencapaian Sasaran Pemerintah Daerah yaitu Memantapkan kualitas pelayanan dasar dan infrastruktur dasar.

2.1.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan

Mengacu pada Visi dan Misi Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan, maka Tujuan Jangka Menengah Dinas Kominfo Provinsi Jambi selama 5 tahun anggaran adalah :

1. Meningkatkan keterbukaan informasi kepada masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dilingkungan Pemprov Jambi.
2. Meningkatkan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi, termasuk fasilitasi pengadaan akses internet di desa untuk mewujudkan Jambi bebas blank spot.
3. Menerapkan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.
4. Meningkatkan tingkat keamanan informasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi
5. Pengelolaan data statistik sektoral Provinsi Jambi dalam Jambi Satu Data.

Sasaran Strategis

Berdasarkan pada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2 Sasaran Strategis Dinas Kominfo Provinsi Jambi Tahun 2021-2026

TUJUAN	INDIKATOR	SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN TAHUN KE				
				2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatkan keterbukaan informasi kepada masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dilingkungan Pemprov Jambi	Persentase OPD yang memnuhi standard layanan informasi	Meningkatnya layanan informasi dan komunikasi publik	Peringkat Keterbukaan Informasi	Menuju Informatif (81)	Menuju Informatif (86)	Informatif (91)	Informatif (93)	Informatif (95)
Mewujudkan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik	Persentase Perangkat Daerah di Lingkup Pemprov Jambi yang memiliki layanan publik online	Meningkatnya Penggunaan teknologi informatika dalam penyelenggaraan pemerintahan	Indeks SPBE	2,7	3.0	3,2	3,3	3,5

2.1.3 Strategi dan Arah Kebijakan

Setelah menentukan tujuan dan sasaran, maka langkah selanjutnya perlu ditentukan bagaimana hal tersebut dapat dicapai. Cara mencapai tujuan dan sasaran merupakan strategi organisasi. Adapun strategi dan arah kebijakan jangka menengah Dinas Kominfo Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.3 Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Kominfo Provinsi Jambi Tahun 2021-2026

NO	SASARAN STRATEGIS	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4
1	Meningkatnya layanan informasi dan komunikasi publik	Peningkatan peran PPID pembantu seluruh OPD dalam Keterbukaan Informasi	mengarahkan seluruh perangkat Daerah agar informatif dalam penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat
2	Mewujudkan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik	Meningkatnya Penggunaan teknologi informatika dalam penyelenggaraan pemerintahan	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE. • Penyusunan Kebijakan Internal Layanan SPBE. • Peningkatan keamanan informasi Penyelenggaraan pemerintahan dengan persandian

Sumber : Renstra Dinas Kominfo 2021-2026

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran.

Penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Renstra, RKT, IKU, dan anggaran atau DPA. Perjanjian Kinerja Dinas Kominfo Provinsi Jambi Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya layanan informasi dan komunikasi publik	1. Peningkatan Keterbukaan Informasi Perangkat daerah 2. Jumlah kerjasama dengan media	Informatif 209 Media

2	Meningkatnya infrastruktur TIK, termasuk fasilitasi pengadaan akses internet di desa untuk mewujudkan Jambi bebas blank spot	1. Jumlah Desa yang difasilitasi akses internet	80 Desa
3	Meningkatnya Penggunaan teknologi informatika dalam penyelenggaraan pemerintahan	Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) Pemerintah Provinsi Jambi	2.8
4.	Meningkatnya layanan persandian	Indeks Keamanan Informasi	Level 1
5.	Meningkatnya ketersediaan data Statistik Sektoral Pemerintah Provinsi Jambi	Persentase OPD yang data statistik sektoral terinventarisasi, terupdate, valid dan terintegrasi	70%
6.	Meningkatnya kualitas pelayanan Kantor dan akuntabilitas kinerja	1. IKM 2. Nilai SAKIP	89 75

Sumber : Dinas Kominfo 2023

2.3 Rencana Anggaran Tahun 2023

Pada Tahun Anggaran 2023 Dinas Kominfo Provinsi Jambi melaksanakan kegiatan dengan anggaran murni yang bersumber dari APBD sebesar Rp.42.424.986.684,- dengan rincian Belanja Tidak Langsung Rp.11.249.315.306,- dan Belanja Langsung Rp.31.722.589.757,-. Melalui mekanisme perubahan APBD 2023 menjadi sebesar Rp.40.067.858.836,- dengan rincian Belanja Tidak Langsung Rp 10.908.329.608,- dan Belanja Langsung Rp.29.650.845.241,-.

2.3.1 Target Belanja Dinas Kominfo Provinsi Jambi

Di dalam perencanaan pelaksanaan kegiatan Dinas Kominfo Provinsi Jambi menetapkan target belanja setelah perubahan sebesar Rp.40.067.858.836,- dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.5 Target Belanja Dinas Kominfo Provinsi Jambi APBD Perubahan Tahun 2023

No	Uraian	Target	Prosentase
I	Belanja Operasi	Rp.40.067.858.836	98.65 %
1	Belanja Pegawai	Rp.9.508.329.608	23.41 %

2	Belanja Barang dan Jasa	Rp.29.159.529.228	71.80 %
3	Belanja Hibah	Rp.1.400.000.000	3.45%
II	Belanja Modal	Rp. 546.760.513	1.35%
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp.491.260.513	1.21%
2	Belanja Modal Aset Lainnya	Rp.55.500.000	0.14%
	Jumlah	Rp.40.614.619.349	

Sumber : Dinas Kominfo 2023

BAB 3

Akuntabilitas Kinerja

Bab 3 berisi :

1. *Capaian kinerja Tahun 2023*
2. *Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis dan Kinerja Lainnya*
3. *Realisasi Anggaran*

3.1 Capaian Kinerja Tahun 2023

Dinas Kominfo Provinsi Jambi telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Dinas Kominfo Provinsi Jambi tahun 2023 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja yaitu:

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	91 ≤ 100	Sangat Baik	Hijau Tua
2.	76 ≤ 90	Tinggi	Hijau Muda
3.	66 ≤ 75	Sedang	Kuning Tua
4.	51 ≤ 65	Rendah	Kuning Muda
5.	≤ 50	Sangat Rendah	Merah

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Kominfo Provinsi Jambi dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Kominfo Provinsi Jambi beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut :

Tabel 3.2 Capaian Kinerja Dinas Kominfo Provinsi Jambi Tahun 2023

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KRITERIA/ KODE warna
1	2	3	5	6	7	8
1.	Meningkatnya layanan informasi dan komunikasi publik	Peringkat Keterbukaan Informasi Publik	Informatif/ 91	Cukup Informatif/ 77,54	85,20%	
		Jumlah Kerjasama	209	291	139%	

2.	Meningkatnya infrastruktur TIK, termasuk fasilitasi pengadaan akses internet di desa untuk mewujudkan Jambi bebas blank spot	Jumlah Desa yang difasilitasi akses internet	80	80	100%	
3.	Meningkatnya Penggunaan teknologi informatika dalam penyelenggaraan pemerintahan	Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	2,8	3,31	118,21%	
4.	Meningkatnya layanan persandian	Indeks Keamanan Informasi	Level 1	Level 1 s,d Level 2/ 52%	100%	
5.	Meningkatnya ketersediaan data Statistik Sektoral Pemerintah Provinsi Jambi	Persentase Data Statistik Sektoral OPD terinventarisasi m terupdate, valid dan terintegrasi	70%	62,79%	89,7%	
6.	Meningkatnya kualitas pelayanan Kantor dan akuntabilitas kinerja	IKM	89	79,26	89,05%	
		Nilai SAKIP	75	*62,11	82,81%	

Sumber : Dinas Kominfo 2023

Dinas Kominfo Provinsi Jambi memiliki 8 (delapan) indikator sasaran yang digunakan untuk mengukur ketercapaian sasaran strategis Dinas Kominfo Provinsi Jambi. Berdasarkan tabel 3.2 dapat diketahui:

- 1) Target dengan capaian realisasi di atas 100% sebanyak 2 target;
- 2) Target dengan capaian realisasi tepat 100% sebanyak 2 target;
- 3) Target dengan capaian realisasi di bawah 100% sebanyak 4 target;

3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis dan Kinerja Lainnya

Pada tahun 2023 Secara detil capaian kinerja Diskominfo Provinsi Jambi dijabarkan dalam beberapa sasaran sebagai berikut :

Sasaran #1: Meningkatkan layanan informasi dan komunikasi publik dengan indikator kinerjanya yakni Peringkat keterbukaan Informasi dan jumlah kerjasama

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1 Peringkat Keterbukaan Informasi Publik	Informatif/ 91	Cukup Informatif/ 77,54	85,20%

2 Jumlah Kerjasama	209	253	121%
--------------------	-----	-----	------

Sasaran ini dicapai melalui program pengelolaan Informasi dan Komunikasi publik yang operasionalisasinya

didukung oleh kegiatan-kegiatan / Sub Kegiatan :

- Monitoring Opini dan Aspirasi Publik
- Pengelolaan Media Komunikasi Publik
- Pelayanan Informasi Publik
- Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan
- Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik
- Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah
- Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi

3.2.1 Peringkat Keterbukaan Informasi Publik

Implementasi dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan salah satu indikator kinerja daerah yang tercantum dalam RPJMD Provinsi Jambi 2021-2026. Untuk memastikan pemerintah daerah melaksanakan amanat tersebut pemerintah pusat memberikan wewenang kepada Komisi Informasi Pusat RI dengan tujuan mengukur transparansi badan publik serta mewujudkan penyelenggaraan negara yang akuntabel, efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan dimana sasarannya adalah seluruh badan publik (Kementerian, Lembaga, BUMN, PTN, dan Pemerintah Provinsi) di Indonesia.

Secara keseluruhan, tahapan, proses dan instrumen yang digunakan tersebut diatas akan menghasilkan nilai dan kualifikasi peringkat Keterbukaan Informasi Publik sebagai berikut :

NO	KUALIFIKASI PERINGKAT	NILAI INDEKS
1	Informatif	97 - 100
2	Menuju Informatif	80 – 96
3	Cukup Informatif	60 – 79
4	Kurang informatif	40 – 59
5	Tidak informatif	<39

Terdapat kesalahan penetapan target yakni 91 dengan kualifikasi peringkat informatif sedangkan seharusnya peringkat menuju informatif yang juga tercantum dalam renstra Diskominfo Tahun 2021-2026.

Berdasarkan hasil penilaian akhir yang termuat dalam Surat Keputusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor: 17/KEP/KIP/XII/2023 tentang Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik Tahun 2023, Pemerintah Provinsi Jambi meraih predikat Cukup Informatif dengan nilai 77,54. Hasil tersebut di atas merupakan akumulasi dari dua

tahapan Monev KIP (pengisian kuisisioner melalui sistem aplikasi e-monev.komisiinformasi.go.id dan presentasi uji publik yang secara langsung dilaksanakan di Jakarta dimana masing-masing persentasenya adalah 80%+20%. Rincian nilai per aspek dapat dilihat sebagai berikut:

Nilai SAQ		Nilai Verifikasi		Nilai Tahap 1 Kuesioner ((Nilai SAQ + Nilai Verifikasi)/2*80%	Nilai Tahap 2 Uji Publik Total Nilai Juri * 20%	Nilai Akhir/ kualifikasi
A. Kualitas Informasi	18	A. Kualitas Informasi	17.4		Nilai Juri: 86.1	
B. Jenis Informasi	20	B. Jenis Informasi	10.4			
C. Pelayanan Informasi	20	C. Pelayanan Informasi	2.4			
D. Komitmen Organisasi	15	D. Komitmen Organisasi	11.1			
E. Sarana dan Prasarana	6.6	E. Sarana dan Prasarana	5.9			
F. Digitalisasi	15	F. Digitalisasi	9			
Total	94.6		56.2	60.32	17.22	77.54/ cukup informatif

Sumber: Komisi Informasi Pusat 2023

Dari rincian penilaian terlihat pada aspek jenis informasi dan pelayanan informasi belum optimal dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Jambi. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi selaku *leading sector* dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik telah melakukan berbagai langkah strategis mulai dari menyurati Perangkat Daerah, koordinasi via whatsapp group, hingga mendatangi secara langsung ke instansi masing-masing guna mendapatkan dokumen informasi publik yang menjadi indikator dalam pelaksanaan Monev KIP 2023.

Terjadi penurunan nilai akibat kendala yang ditemui yakni kurang aktifnya PPID tahun 2023 yang berada pada perangkat daerah dalam memenuhi kebutuhan informasi yang dipublikasi. Selain itu, perubahan pelaksana pada PPID akibat pergeseran jabatan maupun promosi menyebabkan pelatihan yang telah dilaksanakan kepada seluruh PPID menjadi tidak efektif. Permasalahan lainnya yakni dibutuhkan komitmen yang kuat dari kepala perangkat daerah terkait keterbukaan informasi publik.

Menindaklanjuti perihal tersebut, Dinas Kominfo Provinsi Jambi telah melakukan upaya dengan:

- a. Telah menghimpun seluruh kepala perangkat daerah untuk melaksanakan penandatanganan komitmen keterbukaan informasi publik yang disaksikan oleh Gubernur Jambi pada 27 Desember 2023, hal tersebut sebagai langkah awal dalam peningkatan kualitas penyediaan informasi publik di lingkup Pemerintah Provinsi Jambi;
- b. Melaksanakan rapat evaluasi bersama perangkat daerah secara berkala dengan harapan terciptanya kesamaan persepsi terkait dokumen yang wajib tersedia dan menjadi indikator utama dalam pelaksanaan Monev KIP; dan

c. Menyurati perangkat daerah di lingkup Pemerintah Provinsi Jambi.

Perbandingan realisasi Peringkat Keterbukaan Informasi Publik tahun 2021-2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2. Capaian Kinerja 2021-2026

Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023
81,41 (Menuju Informatif)	89,21 (Menuju Informatif)	77.54 (Cukup Informatif)

3.2.2 Jumlah Kerjasama

Kerjasama dengan media yang ditargetkan sebanyak 209 media pada tahun 2023, pada pelaksanaannya telah tercapai target kerjasama sebanyak 291 media sesuai dengan target Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Kominfo yakni dengan terjalannya kerjasama oleh Pemerintah Provinsi Jambi melalui Dinas Kominfo Pemerintah Provinsi Jambi pada tahun 2023 dengan media cetak sebanyak 47 media, media online 219 media, media elektronik TV 6 stasiun televisi, dan radio 19.

Terkait dengan kerjasama media diatas bidang komunikasi publik sudah melakukan pemantauan media melalui Kegiatan Monitoring Opini dan Aspirasi Publik yang merupakan kegiatan Pemantauan Terhadap Media Online lokal yang ada di Provinsi Jambi. Sesuai dengan Data yang ada di Dinas Kominfo Provinsi Jambi ada 219 Media Online yang bekerjasama dan kami pantau dengan Pemerintah Provinsi Jambi, dengan artian bahwa jumlah monev terhadap media penyiaran telah melebihi dari target yang ditetapkan.

Pemantauan Media Online ini dilakukan secara manual. Berita Berita tersebut dimonitoring setiap hari dengan memperhatikan:

1. Berita Gubernur Jambi.
2. Berita Wakil Gubernur Jambi.
3. Berita Sekretaris Daerah Provinsi Jambi.
4. Berita Pemerintah Provinsi Jambi (OPD).
5. Berita Provinsi Jambi (Kab/Kota).
6. Berita Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Provinsi Jambi.
7. Berita Dharma Wanita Persatuan (DWP) Provinsi Jambi.

Monitoring dan Analisa Berita dipantau setiap hari pada media online, media Sosial dan Media Cetak, sedangkan Media Online yang bekerjasama sebanyak 215 media dengan hasil pantauan Berita sentimen Negatif, Sentimen Positif dan Sentimen Netral.

Hambatan dan kendala yang dihadapi yakni Pada Tahun 2023 kegiatan Monitoring dan Analisis Berita Media Online, Media Sosial dan Media Cetak dilakukan secara Manual, sehingga dalam pelaksanaan monitoring menjadi lambat karena harus membuka satu persatu terutama pemantauan pada media online. Sehingga disarankan untuk Monitoring Berita sebaiknya menggunakan Aplikasi Big Data atau Bisa Bekerjasama dengan Pihak ke-3 yaitu PT. Indonesia Indikator (IMM).

Perbandingan realisasi Jumlah Kerjasama tahun 2021-2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2. Capaian Kinerja 2021-2026

Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023
190 Media	253 Media	291 Media

Sasaran #2: Meningkatnya infrastruktur TIK, termasuk fasilitasi pengadaan akses internet di desa untuk mewujudkan Jambi bebas blank spot dengan indikator kinerjanya yakni: Jumlah Desa yang difasilitasi akses internet

Sasaran ini dicapai melalui program Program Pengelolaan Aplikasi Informatika yang operasionalisasinya didukung oleh kegiatan-kegiatan/ Sub Kegiatan: Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah.

Sasaran Diskominfo ini juga mendukung sasaran pemerintah daerah yakni Memantapkan kualitas pelayanan dasar dan infrastruktur dasar yang tercantum dalam RPJMD tahun 2021-2026 dengan indicator Persentase Desa/Kelurahan yang memiliki akses internet.

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah Desa yang difasilitasi akses internet	80	80	100%

Dalam pengadaan internet bagi desa yang masuk dalam kategori blank spot digunakan 3 metode atau cara agar dapat dilaksanakan dengan optimal yaitu :

- 1) Penggunaan fiber optic, opsi ini yang paling dianjurkan karena kualitasnya lebih baik, ini digunakan bagi daerah/desa yang tidak terlalu jauh dari jaringan kabel fiber optic terdekat.
- 2) Triangle yaitu dengan membuat tiang pemancar kecil yang berfungsi sebagai penguat sinyal yang diambil dari BTS terdekat
- 3) VSAT yaitu akses internet yang menggunakan satelit, ini digunakan apabila kondisi geografis sangat terpencil/sulit dijangkau.

Sebaran lokasi Pelaksanaan Penyediaan internet desa tahun 2023 tersebar di 9 kabupaten, 48 kecamatan, dan 80 Desa yang termasuk dalam data 285 Desa Blank SPOT.

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH KECAMATAN	JUMLAH DESA/ KELURAHAN	REALIASI 2022 DESA
1	MUARO JAMBI	2	5	5
2	BATANGHARI	8	8	8
3	TANJUNG JABUNG BARAT	5	11	11
4	TANJUNG JABUNG TIMUR	3	5	5
5	SAROLANGUN	4	8	8
6	MERANGIN	7	14	14
7	BUNGO	7	9	9
8	TEBO	7	11	11
9	KERINCI	5	9	9
TOTAL		48	80	80

Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran/ indicator yakni:

- 1) Kondisi geografis yang cukup sulit dijangkau.
- 2) Keterbatasan alat sehingga jangkauan akses internet yang dapat dinikmati berkisar radius 50-100 meter.

Berdasarkan hambatan dan kendala dapat di rekomendasikan bahwa:

- 1) Mengembangkan internet desa dengan Penyediaan penguatan sinyal gsm;
- 2) Mengusulkan kepada Kementerian Kominfo melalui Ditjen BAKTI untuk menyediakan DAK urusan infrastruktur TIK atau usulan pembangunan BTS atau sejenisnya untuk mendukung pelayanan di daerah.

Tabel 3.2. Capaian Kinerja 2021-2026

Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023
3	125 Desa	80 Desa

Sasaran #3: Meningkatnya Penggunaan teknologi informatika dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan indikator kinerjanya yakni: Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)

Sasaran ini dicapai melalui program Program Pengelolaan Aplikasi Informatika yang operasionalisasinya didukung oleh kegiatan-kegiatan/ Sub Kegiatan :

1. Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain diLingkup Pemerintah Daerah Provinsi

- a. Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi
2. Pengelolaan e-government diLingkup Pemerintah Daerah Provinsi
 - a. Penatalaksanaan dan pengawasan e-goverment dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi
 - b. Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintah Berbasis Elektronik
 - c. Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	2,8 (Baik)	3,31 (Baik)	118,21 %

Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menggambarkan tingkat kematangan (*maturity level*) dari pelaksanaan/penerapan SPBE di K/L/Pemda. Indeks SPBE diperoleh dari hasil evaluasi SPBE terhadap K/L/Pemda yang dilakukan secara periodik untuk mengetahui sejauh mana kemajuan dari penerapan SPBE di setiap K/L/Pemda. Pengukuran Nilai Indeks SPBE tahun 2023 menggunakan PermenPANRB Nomor 59 tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Dalam peraturan tersebut juga dijabarkan predikat penilaian SPBE yang mempresentasikan tingkat kematangan penerapan SPBE seperti yang tertera pada tabel berikut ini:

NO	NILAI INDEKS	PREDIKAT
1	4,2 – 5,0	Memuaskan
2	3,5 - < 4,2	Sangat Baik
3	2,6 - < 3,5	Baik
4	1,8 - < 2,6	Cukup
5	< 1,8	Kurang

Tim Kementerian PANRB bersama Asesor Eksternal telah melakukan verifikasi, validasi dan penilaian pelaksanaan SPBE dengan hasil yang tertera pada Keputusan Menteri PANRB Nomor 13 Tahun 2024 tentang Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2023. Hasil evaluasi SPBE Pemerintah Provinsi Jambi tercatat di angka Indeks 3,31 dengan kategori baik. Rincian penilaian per aspek dapat dilihat sebagai berikut:

NAMA INDEKS	NILAI 2023
Domain 1 – Kebijakan SPBE	2,80
Aspek 1 - Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE	2,80
Domain 2 - Tata Kelola SPBE	2,70

Aspek 2 - Perencanaan Strategis	2,25
Aspek 3 - Teknologi Informasi dan Komunikasi	2,75
Aspek 4 - Penyelenggaraan SPBE	3,50
Domain 3 - Manajemen SPBE	1,82
Aspek 5 - Penerapan Manajemen SPBE	1,75
Aspek 6 - Audit TIK	2,00
Domain 4 - Layanan SPBE	4,32
Aspek 7 - Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	4,10
Aspek 8 - Layanan Publik Berbasis Elektronik	4,67

Peningkatan capaian kinerja ini merupakan wujud komitmen Provinsi Jambi dalam mendukung program prioritas nasional dengan bukti bahwa capaian indeks SPBE di Provinsi Jambi berada di atas rata-rata nilai Provinsi seIndonesia yang hanya sebesar 3,01 dan diatas rata-rata nilai nasional yang hanya sebesar 2,79. Pada domain layanan SPBE yang menggambarkan layanan secara elektronik, Pemrov Jambi sangat memprioritaskan hal tersebut sehingga diharapkan adanya peningkatan layanan bagi ASN maupun masyarakat di Provinsi Jambi.

Namun dari evaluasi SPBE tahun 2023 juga terdapat kelemahan, bahwa Domain Manajemen SPBE dinilai belum optimal dalam penerapan SPBE di Provinsi Jambi. Manajemen SPBE merupakan serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE yang efektif, efisien dan berkesinambungan serta layanan SPBE yang berkualitas. Manajemen SPBE ini terdiri dari 8 indikator yang dinilai penerapannya masih sangat rendah ditandai dengan nilai kematangan hanya 1 dari 8 indikator yang bernilai 3, sisanya 2 dan 1. Penerapan manajemen resiko SPBE sudah mengalami perbaikan namun perlu dioptimalkan sedangkan pada indicator lainnya perlu adanya kerja keras serta komitmen untuk mencapai tingkat kematangan yang diinginkan. Selain itu jika dilihat lebih lanjut pada 47 indikator pada masing-masing aspek penilaian terdapat kelemahan yang harus ditindaklanjuti, yakni:

- 1) Penggunaan system penghubung layanan belum maksimal dimanfaatkan dan merupakan salah satu indicator kinerja daerah yang tercantum dalam RPJMD tahun 2021-2026;
- 2) Pada aspek perencanaan strategis butuh perbaikan yang optimal terutama pada indicator rencana dan anggaran SPBE;
- 3) Pada aspek manajemen SPBE banyak indicator yang belum optimal seperti; peningkatan penerapan kompetensi SDM, manajemen pengetahuan, manajemen perubahan, manajemen layanan SPBE. Upaya lainnya dengan menugaskan SDM yang

ada untuk mengikuti diklat/workshop dan sejenisnya dalam hal Komunikasi dan Informasi serta melakukan audit TIK secara internal maupun eksternal.

Upaya peningkatan ini terutama pada domain manajemen SPBE ini diperlukan sinergi dan kolaborasi dari seluruh perangkat daerah. Untuk meningkatkan keberhasilan penerapan SPBE Provinsi Jambi secara keseluruhan mutlak diperlukan tanggungjawab dari lintas perangkat daerah yang saling terkait, koordinasi yang baik, sinergi, komitmen serta kesungguhan perangkat daerah.

Perbandingan realisasi Indeks SPBE tahun 2021-2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2. Realisasi Indeks SPBE Tahun 2021-2026

Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023
2,16 (Cukup)	2,19 (Cukup)	3,31 (Baik)

Sasaran #4: Meningkatnya layanan persandian dengan indikator kinerjanya yakni: Indeks Keamanan Informasi

Sasaran ini dicapai melalui program Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi yang operasionalisasinya didukung oleh kegiatan-kegiatan/ Sub Kegiatan :

1. Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi
2. Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi
3. Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik
4. Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Keamanan Informasi	Level 1	Level 1/ nilai 338 atau 52%	100 %

Penyelenggaraan persandian di Pemerintah Daerah Provinsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 di bidang persandian yakni; (1) Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi dan (2) penetapan pola hubungan Komunikasi antar Perangkat daerah provinsi. Pada pelaksanaannya alat evaluasi untuk menganalisis tingkat kesiapan pengamanan Informasi di organisasi Pemerintah Daerah menggunakan penilaian Indeks KAMI. Badan Siber dan

Sandi Negara RI ditunjuk sebagai penilai melakukan verifikasi terhadap penilaian mandiri yang telah dilaksanakan oleh Dinas Kominfo Provinsi Jambi pada delapan aspek yakni :

1. Tata Kelola;
2. Pengelolaan Resiko;
3. Kerangka Kerja Keamanan Informasi;
4. Pengelolaan Aset;
5. Teknologi dan Keamanan Informasi;
6. Pengamanan keterlibatan pihak ketiga;
7. Pengamanan layanan infrastruktur awal; dan
8. Perlindungan data pribadi.

Dari hasil penilaian mandiri total nilai dengan dasar kelengkapan penerapan standar ISO 27001 sesuai kategori berada pada nilai 322. Namun setelah dilakukan verifikasi oleh Badan Riset dan Sandi Negara RI diperoleh nilai yang lebih tinggi yakni 338.

Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam mencapai sasaran tercantum dalam laporan onsite Assesment Indeks KAMI yang terbatas. Rekomendasi yang dapat dilakukan Diskominfo yakni:

1. Menyusun dan segera menetapkan Peraturan Sistem Manajemen Keamanan Informasi beserta tata tertib/ketentuan/prosedur turunannya yang dapat mengatur penyelenggaraan keamanan informasi secara keseluruhan pada ruang lingkup Diskominfo dan OPD dibawahnya;
2. Menyelenggarakan kegiatan sosialisasi kepada seluruh ASN dalam rangka meningkatkan kesadaran Keamanan Informasi pribadi atau kegiatan dapat terbagi untuk sosialisasi pentingnya Penyelenggaraan persandian bagi unsur pimpinan dan pengelola SPBE;
3. merumuskan kebijakan dan prosedur terkait perlindungan data pribadi untuk menjadi pedoman tertulis dalam implementasi yang telah diterapkan saat ini, dan mengidentifikasi data pribadi yang digunakan dalam proses kerja dan menerapkan pengamanan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
4. Melaksanakan rekomendasi dari hasil laporan Onsite Assesment Indeks KAMI untuk meningkatkan Keamanan Informasi.

Perbandingan realisasi Indeks KAMI tahun 2021-2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2. Realisasi Tahun 2021-2026

Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023
Level 1	Level 1/ nilai 332 atau 51.47%	Level 1/ nilai 338 atau 52%

Sasaran #5: Meningkatnya ketersediaan data Statistik Sektoral Pemerintah Provinsi Jambi dengan indikator kinerjanya yakni: Persentase Data Statistik Sektoral OPD terinventarisasi terupdate, valid dan terintegrasi.

Sasaran ini dicapai melalui program Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang operasionalisasinya didukung oleh kegiatan-kegiatan/ Sub Kegiatan:

1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi data Statistik Sektoral
2. Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang terintegrasi
3. Membangun Metadata Statistik Sektoral

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Data Statistik Sektoral OPD terinventarisasi terupdate, valid dan terintegrasi.	70%	62,79%	89,7%

Upaya mewujudkan satu data Indonesia yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia Pemerintah Provinsi Jambi mendorong seluruh Perangkat daerah untuk memenuhi data statistik sektoral. Capaian saat ini dari 43 perangkat daerah baru 27 Perangkat Daerah yang melakukan pemenuhan data statistik sektoral.

Sebagai upaya perbaikan BPS sebagai Pembina data statistik melakukan evaluasi Penyelenggaraan statistik sektoral (EPSS) untuk mengukur capaian kemajuan Penyelenggaraan statistik sektoral, meningkatkan kualitas Penyelenggaraan statistik sektoral, dan meningkatkan kualitas pelayanan di bidang statistik. EPSS dilaksanakan berdasarkan Peraturan Badan Statistik Nomor 3 Tahun 2022 dengan keluaran hasil penilaian Indeks Pembangunan Statistik yang dilaksanakan pada Tahun 2023 dengan hasil nilai Pemerintah Provinsi Jambi sebesar **1,88 predikat cukup**. Mengingat Indeks Pembangunan Statistik akan menjadi indikator penilaian reformasi birokrasi maka perlu dipersiapkan untuk Pelaksanaan di tahun 2024.

Terdapat lima kriteria tingkat kematangan yakni (1) Rintisan: proses penyelenggaraan statistik belum dilakukan oleh seluruh unit kerja, (2) terkelola: proses Penyelenggaraan statistik sektoral telah dilakukan oleh seluruh unit kerja, namun masih menggunakan standar yang hanya berlaku di unit itu sendiri, (3) terdefinisi: Proses penyelenggaraan statistik sektoral telah diharmonisasi dan kemudian ditetapkan sebuah standar atau pedoman oleh unit yang melaksanakan fungsi manajemen dan berlaku untuk seluruh unit kerja dalam organisasi, (4) Terpadu dan terukur: Proses penyelenggaraan statistik sektoral telah dilakukan secara terpadu dan telah berkontribusi pada kinerja organisasi. Kinerja penyelenggaraan statistik sektoral dapat diukur melalui kegiatan reuiu

dan evaluasi pada setiap proses, (5) Optimum: Proses penyelenggaraan statistik sektoral telah dilakukan peningkatan kualitas secara berkesinambungan berdasarkan hasil revidi dan evaluasi.

Pada penilaiannya yang menghasilkan Indeks Pembangunan Statistik, BPS melakukan evaluasi pada 5 domain yakni, prinsip SDI, Kualitas Data, Proses Bisnis Statistik, kelembagaan, statistik nasional.

Pada tahun 2022 telah dikembangkan aplikasi portal satu data Jambi sebagai aplikasi pengolah data pembangunan khususnya statistik sektoral yang terpadu dan terintegrasi untuk kebutuhan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah dan Open Data yang merupakan sarana publikasi data statistik sektoral kepada masyarakat. Namun pada pelaksanaannya di Tahun 2023 terdapat kendala dengan tidak munculnya jendela portal daerah Provinsi Jambi.

Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam mencapai sasaran yakni:

1. Data statistik sektoral masih tersebar di OPD Lembaga lainnya, sebagian besar sudah diolah dalam aplikasi pengolahan data namun belum semuanya dapat terintegrasi dalam aplikasi Open Data;
2. Belum adanya standar data statistik sektoral yang disusun untuk menjadi dasar dalam penyusunan dokumen perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah;
3. Pemanfaatan portal Open Data yang kurang maksimal, dan belum semua aplikasi milik Badan Publik terintegrasi dengan Open Data; dan
4. Peran Badan Publik masih belum aktif dalam menyampaikan informasi data terbaru di website opendata.pemprovjambi.go.id.

Berdasarkan hambatan dan kendala yang dihadapi, rekomendasi yang dapat dilakukan untuk perbaikan capaian kinerja yakni:

1. Meningkatkan nilai Indeks Pembangunan Statistik yang terdiri dari 5 domain, 19 aspek, dan 38 indikator.
2. Melakukan kegiatan bimbingan teknis terkait pengelolaan data statistik sektoral;
3. Menyiapkan jendela portal statistik Provinsi Jambi jika portal open data belum dapat dimanfaatkan lebih luas;
4. melakukan integrasi system dan pembinaan berkelanjutan terhadap seluruh Perangkat Daerah; dan
5. Melakukan Sosialisasi supaya peran dan komitmen Badan Publik terhadap pemenuhan data di website opendata.pemprovjambi.go.id.

Perbandingan realisasi Persentase Data Statistik Sektor OPD terinventarisasi terupdate, valid dan terintegrasi tahun 2021-2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2. Realisasi Tahun 2021-2026

Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023
40%	50%	62,79%

Sasaran #6: Meningkatnya kualitas pelayanan Kantor dan akuntabilitas kinerja dengan indikator kerjanya yakni: IKM dan nilai SAKIP

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1 IKM	89	79,26	89,05%
2 Nilai SAKIP	75	*62,11	82,81%

Sasaran ini dicapai melalui program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi yang operasionalisasinya didukung oleh kegiatan-kegiatan/ Sub Kegiatan:

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan DPA -SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Pelaksanaan dan Penatausahaan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi

4. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

1. IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)

Salah satu upaya guna meningkatkan kualitas pelayanan publik, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menegaskan bahwa penyelenggara berkewajiban melakukan penilaian kinerja penyelenggaraan pelayanan publik secara berkala. Dimana salah satu kegiatan yang harus ada adalah dengan melakukan penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) sebagai tolak ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Berdasarkan pengukuran terhadap kualitas 9 unsur pelayanan dan mengacu pada kategori mutu pelayanan, maka diperoleh hasil skor Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Provinsi Jambi Tahun 2022 sebesar 79,261 menurun dari tahun 2022 sebesar 87,434 dan berada dalam mutu pelayanan B dengan kategori BAIK, karena berada dalam nilai interval konversi Indeks Kepuasan Masyarakat 76,61-88,30. Rata-rata dari semua unsur pelayanan, kinerja pelayanannya adalah baik.

No.	Unsur Pelayanan	Nilar Rata-Rata	NRR X 25
U1	Persyaratan pelayanan	3,125	78,13
U2	Prosedur pelayanan	3,125	78,13
U3	Waktu pelayanan	3	75
U4	Biaya/tarif pelayanan	3,313	82,81
U5	Produk/hasil pelayanan	3,125	78,13
U6	Kemampuan petugas pelayanan	3,250	81,25
U7	Perilaku petugas pelayanan	2,938	73,44
U8	Kualitas sarana dan Prasarana	2,938	73,44
U9	Penanganan pengaduan pelayanan	3,688	92,19
Indeks Kepuasan Masyarakat		3,170	79,261

Berdasarkan hasil survey IKM tersebut, untuk kualitas pelayanan pada Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Provinsi Jambi masih dipersepsikan Baik oleh penggunanya. Hal ini terlihat dari hasil skor IKM : 79,261 dan berada dalam mutu pelayanan B dengan kategori BAIK, karena berada dalam nilai interval 76,61-88,30.

Jika dibandingkan nilai unsur pelayanan dengan IKM Provinsi, Nilai IKM pelayanan di Kominfo Provinsi Jambi Tahun 2023 sebesar 79,261 lebih rendah dari nilai unsur Provinsi sebesar 83,809. Oleh karena itu kinerja pelayanan dari OPD Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Provinsi Jambi harus tetap dipertahankan dan terus ditingkatkan, sehingga pelayanan terkait komunikasi

dan informasi terutama Informasi terkait program pembangunan sampai ke masyarakat sehingga dapat menggerakkan ekonomi masyarakat maupun daerah berkembang dan tumbuh dengan baik yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

hambatan yang dihadapi dalam melaksanakan indicator yakni:

- 1) Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat hanya melalui penyebaran secara manual sehingga menjangkau lebih sedikit dari sampel yang seharusnya;
- 2) Pengelola SKM belum mendapatkan pengetahuan yang memadai dalam proses penyebaran kuesioner sampai dengan pengolahan;
- 3) Pelayanan Informasi di PPID pada tahun 2023 cenderung menurun dilihat dari hasil peringkat keterbukaan Informasi publik yang juga menurun dibandingkan tahun 2022.

Berdasarkan hambatan yang dihadapi pada Pelaksanaan SKM dapat melakukan:

- 1) Selain menyiapkan kuesioner pada selembur kertas dapat juga membuat kuesioner secara digital melalui google form atau website diskominfo.jambiprov.go.id;
- 2) Mengikuti kegiatan sosialisasi atau pendampingan oleh biro organisasi setda atau oleh Menpan RB;
- 3) Meningkatkan layanan Informasi PPID Diskominfo Provinsi Jambi melalui pemenuhan indicator penilaian peringkat keterbukaan Informasi publik.

Perbandingan realisasi Nilai IKM tahun 2021-2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2. Realisasi Nilai IKM Tahun 2021-2026

Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023
85/Baik	87,434/ Baik	79,26/ Baik

2. Nilai SAKIP

Nilai Akuntabilitas Kinerja menggambarkan sudah sejauh mana instansi pemerintah mampu mempertanggungjawabkan hasil atas penggunaan anggaran yang dilaksanakannya. Nilai tersebut diperoleh melalui Evaluasi Implementasi SAKIP yang dilakukan berdasarkan Permen-PANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Berdasarkan kebijakan tersebut, hasil penilaian evaluasi SAKIP di instansi pemerintah dapat dikategorikan sebagai berikut:

No.	Nilai	Predikat	Interpretasi
1.	>90 - 100	AA	Sangat Memuaskan
2.	>80 – 90	A	Memuaskan

3.	>70 – 80	BB	Sangat Baik
4.	>60 – 70	B	Baik
5.	>50 - 60	CC	Cukup (Memadai)
6.	>30 – 50	C	Kurang
7.	>0 - 30	D	Sangat Kurang

Penilaian SAKIP dilakukan pada tahun berikutnya sehingga pada proses pembuatan laporan kinerja instansi Pemerintah menggunakan hasil penilaian SAKIP tahun 2022 dengan hasil 62,11 Kategori Baik dengan predikat B.Hambatan dan kendala yang dihadapi yakni Diskominfo Provinsi Jambi belum menindaklanjuti Rekomendasi hasil evaluasi SAKIP tahun sebelumnya sehingga tidak mencapai target yang telah ditetapkan.

Rekomendasi Tahun yang tertera pada LHE yakni:

- 1) Menyajikan indicator pada rumusan tujuan yang akan dicapai;
- 2) Menyusun rencana kerja tahunan sesuai dengan sistematika yang telah diatur dalam pasal 129 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017;
- 3) Menyelaraskan diagram *cascading* antara kondisi/hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan;
- 4) Menyajikan analisis efisiensi penggunaan sumber daya pada BAB III LKJIP;
- 5) Mempublikasikan perencanaan kinerja, pelaporan kinerja, sesuai dengan waktu yang telah ditentukan;
- 6) Menyusun laporan kinerja sesuai dengan Permenpan Nomor 53 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; dan
- 7) Menindaklanjuti LHE AKIP tahun sebelumnya.

Inspektorat Provinsi Jambi juga menyarankan untuk Pelaksanaan dan pencapaian kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja dan anggaran yang telah dialokasikan merupakan tanggungjawab pimpinan untuk meningkatkan implementasi SAKIP di unit kerja yang dipimpinnya sehingga memberikan motivasi kepada bawahan untuk saling bersinergi untuk mencapai tujuan organisasi secara optimal.

Perbandingan realisasi Nilai SAKIP tahun 2021-2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2. Realisasi Tahun 2021-2026

Realisasi 2021 (SAKIP 2020)	Realisasi 2022 (SAKIP 2021)	Realisasi 2023 (SAKIP 2022)

62,1/B/Baik	63,49/B/baik	62,11/ B/ Baik
-------------	--------------	----------------

Meskipun nilai yang tercantum secara periodik namun penilaian SAKIP 2022 tidak dapat dilakukan perbandingan dengan capaian kinerja perkomponen dengan tahun sebelumnya mengingat adanya perubahan yang tercantum dalam Permenpan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

3.3. Realisasi Anggaran

Penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2023 sebesar Rp.39.854.056.118,- (98,13%) dari total anggaran yang dialokasikan. Realisasi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar Rp.25.330.383.792,- (98,87%), sedangkan realisasi untuk program/kegiatan pendukung sebesar Rp.14.523.672.326 (96,86%).

Anggaran dan realisasi belanja tahun 2023 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.9. Anggaran dan Realisasi Belanja Dinas Kominfo Provinsi Jambi Tahun 2023

Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi %	
1		2	3	4		
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	243.972.681	201.532.519	82,60	
	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	30.175.306	16.951.478	56,18	
	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	11.450.000	3.070.000	26,81	
	3	Koordinasi dan Penyusunan DPA - SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	8.820.000	8.820.000	100
	4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	Jumlah dokumen laporan	193.527.375	172.691.041	89,23

		Ikhisar Realisasi SKPD				
	2	2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		9.292.844.008	9.075.231.646	97,67
	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan tunjangan ASN	9.035.309.608	8.818.771.331	97,60
	2	Pelaksanaan dan Penatausahaan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	251.194.400	250.280.315	99,44
	3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan keuangan akhir tahun	6.340.000	6.180.000	97,48
	3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		217.845.300	210.085.218	96,44
	1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	97.500.000	97.200.000	99,69
	2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang mengikuti pendidikan/latihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	120.345.300	112.885.218	93,80
	4	Administrasi Umum Perangkat Daerah		1.161.268.980	1.127.027.541	97,05
	1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	261.414.814	261.067.248	99,87
	2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	37.375.000	33.612.500	89,93
	3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	64.248.750	58.750.214	91,44
	4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	63.070.416	51.650.513	81,89
	5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	735.160.000	721.947.066	98,20
	5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		561.595.795	552.197.258	98,33

	1	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	179.893.803	179.817.258	99,96
	2	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya		381.701.992	372.380.000	97,56
	6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		2.872.429.819	2.867.713.187	99,84
	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.200.000	1.860.360	84,56
	2	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2.857.290.400	2.854.186.627	99,89
	3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12.939.419	11.666.200	90,16
	7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan		644.842.020	489.884.957	75,97
	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan,pajak dan perizinan kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	406.266.020	266.802.257	65,67
	2	Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	168.096.000	167.237.600	99,49
	3	Pemeliharaan/rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	70.480.000	55.845.100	79,24
2.	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK					
	1	Pengelolaan Informasi dan Komunikas Daerah Provinsi		16.927.972.640	16.798.999.486	99,24

	1	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	270.987.860	252.511.519	93,18
	2	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	12.730.773.608	12.723.294.794	99,94
	3	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	285.775.450	284.340.523	99,50
	4	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	2.082.513.074	1.998.186.656	95,95
	5	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya	210.881.300	208.755.756	98,99
	6	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	1.082.401.348	1.071.370.238	98,98
	7	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi		264.640.000	260.540.000	98,45
3	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA					
	1	Pengelolaan Nama Domain yang telah Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Daerah Provinsi		90.907.515	90.410.442	99,45
	1	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	90.907.515	90.410.442	99,45
	2	Pengelolaan e-government diLingkup Pe Provinsi		7.590.647.930	7.441.918.828	98,04
	1	Penatalaksanaan dan pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	195.789.800	195.702.955	99,96

		2	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintah Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	688.799.730	643.821.014	93,47
		3	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	6.199.316.400	6.096.414.845	98,34
		4	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Jumlah Dokumen Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	506.742.000	505.980.014	99,85
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL						
	1	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di L Provinsi			380.202.152	369.643.814	97,22
		1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	110.171.667	105.784.334	96,02
		2	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang terintegrasi	Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	167.883.028	167.133.738	99,55
		3	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	102.147.457	96.725.742	94,69
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI						
	1	Penyelenggaraan Persandian untuk Pe Pemerintah Daerah Provinsi			595.160.209	594.480.922	99,89
		1	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah kebijakan tata kelola keamanan informasi, dan kebijakan jaring komunikasi sandi	95.167.644	94.852.074	99,67

				pemerintah daerah provinsi			
		2	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Audit Keamanan Informasi di Pemerintah Provinsi Jambi	223.584.800	223.573.749	100
		3	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Keamanan Informasi Provinsi dan Kab/Kota	84.629.606	84.498.657	99,85
		4	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	191.778.159	191.556.442	99,88
	2	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Perangkat Daerah Provinsi			34.930.300	34.930.300	100
		1	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	34.930.300	34.930.300	100
					40.614.619.349	39.854.056.118	98,13

Tabel 3.10 Analisis efisiensi Dinas Kominfo Provinsi Jambi Tahun 2023

NO.	SASARAN	INDIKATOR	%CAPAIAN KINERJA	% PENYERAPAN ANGGARAN
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya layanan informasi dan komunikasi publik	Peringkat Keterbukaan Informasi Publik	85,20%	99,94%
		Jumlah Kerjasama dengan media	139%	97,51%
2.	Meningkatnya infrastruktur TIK, termasuk fasilitasi pengadaan akses internet di desa untuk mewujudkan Jambi bebas blank spot	Jumlah Desa yang difasilitasi akses internet	100%	98,34
3.	Meningkatnya Penggunaan teknologi informatika dalam penyelenggaraan pemerintahan	Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	118,21%	98,18%
4.	Meningkatnya layanan persandian	Indeks Keamanan Informasi	100%	99,89%

5.	Meningkatnya ketersediaan data Statistik Sektoral Pemerintah Provinsi Jambi	Persentase Data Statistik Sektoral OPD terinventarisasi terupdate, valid dan terintegrasi	89,7%	97,22%
6.	Meningkatnya kualitas pelayanan Kantor dan akuntabilitas kinerja	IKM	89,05%	92,55%
		Nilai SAKIP	82,81%	
RATA -RATA			100,49%	98,13
EFISIENSI		CAPAIAN >100% dengan serapan anggaran 98,13%	1,87% efisiensi anggaran atau Rp. 759.493.381.826,-	

Sumber: Dinas Kominfo 2023

Berdasarkan tabel 3.10 di atas, kinerja sasaran strategis Dinas Kominfo Provinsi Jambi telah melebihi target, dengan tingkat efisiensi sebesar 1,87%. Efisiensi anggaran untuk mencapai sasaran diperoleh melalui perbaikan proses bisnis, pemanfaatan teknologi informasi dan penghematan penggunaan sarana prasarana. Namun perlu menjadi perhatian terhadap indikator peringkat keterbukaan Informasi publik, indikator Persentase Data Statistik Sektoral OPD terinventarisasi terupdate, valid dan terintegrasi, indikator IKM, dan Indikator SAKIP karena capaian realisasi Keuangan lebih besar dari pada capaian kinerja.

BAB 4

Bab 4 berisi :

4. *Kesimpulan*
5. *Rencana Tindak Lanjut*

Penutup

Penyelenggaraan kegiatan di Dinas kominfo pada Tahun Anggaran 2023 merupakan tahun keempat dari Rencana Strategis Dinas Kominfo Tahun 2021-2026. Keberhasilan yang dicapai berkat kerja sama dan partisipasi semua pihak dan diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan. Sementara itu, untuk target-target yang belum tercapai perlu diantisipasi dan didukung oleh berbagai pihak.

Hasil laporan kinerja Dinas Kominfo tahun 2023 dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Target dengan capaian realisasi di atas 100% sebanyak 2 target;
2. Target dengan capaian realisasi tepat 100% sebanyak 2 target; dan
3. Target dengan capaian realisasi di atas 76%-90% sebanyak 5 target
4. Realisasi kinerja Dinas Kominfo telah melampaui target yang ditetapkan pada tahun 2023 yaitu sebesar 100,49%, dengan efisiensi anggaran sebesar 1,87%

Secara umum, pencapaian target tidak mengalami kendala yang signifikan, meskipun demikian masih terdapat permasalahan yang dapat menghambat peningkatan kinerja pada capaian indikator *peringkat* keterbukaan Informasi publik, indikator Persentase Data Statistik Sektor OPD terinventarisasi *terupdate*, valid dan terintegrasi, indikator IKM, dan Indikator SAKIP karena capaian realisasi Keuangan lebih besar dari pada capaian kinerja.

Langkah-langkah yang akan diambil untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dapat dirumuskan Rencana Tindak Lanjut sebagai berikut :

1. Menghimpun seluruh data untuk memenuhi keterbukaan Informasi publik kepada seluruh PPID di Perangkat Daerah dan melakukan pembinaan secara berkelanjutan.
2. Melakukan penyesuaian target pada program Penyelenggaraan statistik sektoral dengan Indeks Pembangunan Statistik dikarenakan akan menjadi penilaian Reformasi Birokrasi dan menjadi IKU Kemendagri.
3. Melakukan perbaikan layanan terutama pada layanan Informasi publik serta melakukan survei kepuasan masyarakat tidak hanya melalui form manual namun memanfaatkan teknologi dan Informasi.
4. Menindaklanjuti rekomendasi LHE AKIP untuk perbaikan nilai SAKIP.
5. Melakukan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan yang lebih berkualitas, melalui pendekatan 4 (empat) pilar *Balance Score Card* (BSC) yang meliputi pendekatan *customer perspective*, *internal process*, *financial perspective*, dan *learning and growth perspective*.

